



1. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa dikategorikan sebagai *tax planning*, kecuali:
 - A. Pemilihan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas dibanding Perusahaan Perseorangan
 - B. Pemilihan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 kepada daripada tanggungan PPh Pasal 21 kepada karyawan
 - C. **Membuat transaksi fiktif dengan *paper company* di negara yang tarif pajaknya rendah**
 - D. Menggeser penghasilan dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan berelasi (*related party*) di luar negeri

2. Berikut adalah ketentuan pajak terkait dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi, kecuali:
 - A. Pembayaran yang diperoleh *lessor* merupakan objek Pajak Penghasilan
 - B. Pembayaran oleh *lessee* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
 - C. *Lessee* wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran kepada *lessor*
 - D. ***Lessee* membebankan biaya penyusutan atas barang yang disewa-guna-usahakan**

3. PT ABC melakukan penjualan barang yang termasuk dalam kelompok barang yang PPN-nya dibebaskan. Selama Desember 2015, PT ABC melakukan pembelian bahan baku sebesar Rp100 juta dan pembayaran biaya sewa mesin sebesar Rp25 juta. Berapa pajak masukan yang bisa dikreditkan oleh PT ABC selama Desember 2015?
 - A. **Rp0**
 - B. Rp2,5 juta
 - C. Rp10 juta
 - D. Rp12,5 juta



4. PT BIG menerima SKPKB PPh Badan Tahun 2014 yang diterbitkan pada 10 Oktober 2015 dengan kurang bayar Rp1,5 miliar. Atas SKPKB tersebut, PT BIG hanya menyetujui Rp200 juta dan mengajukan keberatan pada 5 Desember 2015 (seluruh persyaratan pengajuan keberatan telah dipenuhi PT BIG). Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan PT BIG, sehingga pada 10 Februari 2016 diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menyatakan bahwa wajib pajak kurang bayar sebesar Rp500 juta (bukan kurang bayar Rp1,5 miliar seperti yang disebutkan dalam SKPKB).

Berapa yang harus dibayar PT BIG setelah menerima Surat Keputusan Keberatan untuk kedua kondisi di bawah:

- (1) Apabila PT BIG tidak mengajukan banding
 - (2) Apabila PT BIG mengajukan banding
- A. (1) Rp200 juta atau (2) Rp250 juta
 - B. **(1) Rp300 juta atau (2) Rp0**
 - C. (1) Rp500juta atau (2) Rp250 juta
 - D. (1) Rp700 juta atau (2) Rp0
5. Berikut ini adalah biaya yang tidak boleh dibebankan oleh wajib pajak yaitu:
- A. Pembagian laba, natura yang diterima karyawan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, sanksi administrasi
 - B. **Pembagian laba, natura yang diterima karyawan, premi asuransi yang dibayar wajib pajak orang pribadi, pajak penghasilan**
 - C. Biaya beasiswa, natura yang diterima karyawan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, pajak penghasilan
 - D. Biaya beasiswa, natura yang diterima karyawan, premi asuransi yang dibayar wajib pajak orang pribadi, sanksi administrasi



6. Berikut adalah aspek perpajakan dari bentuk usaha di Indonesia:

NO	ASPEK PERPAJAKAN
1	Harus menggunakan pembukuan
2	Tidak harus menggunakan pembukuan
3	<i>Economic double taxation</i>
4	Pembagian keuntungan bukan objek pajak
5	Pembagian keuntungan objek pajak
6	Laba kena pajak dikenakan tarif progresif
7	Laba kena pajak dikenakan tarif tunggal

Di antara aspek perpajakan di atas, maka secara berurutan yang merupakan aspek perpajakan dari perseroan, persekutuan dan perusahaan perseorangan adalah:

- A. 1 - 3 - 6
- B. 3 - 4 - 6
- C. 5 - 7 - 1
- D. 7 - 1 - 3

7. Pasangan pernyataan berikut semuanya tepat, kecuali:

- A. Tunjangan transportasi adalah objek PPh Pasal 21
- B. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan merupakan *non-deductible expenses*
- C. **Telepon seluler untuk manajer merupakan *deductible expenses***
- D. Pengobatan karyawan di klinik perusahaan bukan objek PPh Pasal 21



8. Berikut adalah beberapa transaksi yang dilakukan PT CBA selama tahun 2015:
- Pemberian jasa pemeliharaan komputer sebesar Rp100 juta
 - Pembayaran jasa auditor senilai Rp25 juta
 - Pembayaran sewa mesin Rp10 juta
 - Penjualan barang kepada Pemda DKI senilai Rp200 juta
 - Pembayaran gaji pegawai senilai Rp45 juta dan tunjangan PPh Pasal 21 senilai Rp3 juta
- Kewajiban *withholding tax* yang harus dilakukan PT CBA untuk transaksi-transaksi tersebut adalah:
- A. Rp5.000.000
 - B. Rp4.700.000
 - C. Rp3.700.000**
 - D. Rp3.000.000
9. Mana dari pernyataan berikut yang paling tepat jika PT ACI sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penjualan barang kepada konsumen non-PKP:
- A. PT ACI tidak bisa mengkreditkan PPN Masukan sebab melakukan penjualan kepada konsumen non-PKP
 - B. PT ACI tidak wajib memungut PPN karena konsumen non-PKP tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan
 - C. PT ACI tidak bisa mengkreditkan PPN Masukan sebab faktur yang diterima tidak dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak
 - D. PT ACI harus memungut dan melaporkan PPN atas penjualannya kepada konsumen non-PKP**



10. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang pengkreditan Pajak Masukan, kecuali:

- A. **Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak bisa dikreditkan**
- B. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilakukan bagi perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- C. Pajak Masukan dapat dikreditkan paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
- D. Pajak Masukan yang bisa dikreditkan harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material

11. Berikut adalah laba (rugi) yang diperoleh PT XYZ dari tahun 2011 hingga 2015:

TAHUN	LABA (RUGI) DALAM RP
2011	(100.000.000)
2012	75.000.000
2013	100.000.000
2014	(50.000.000)
2015	100.000.000

Berapa Pajak Penghasilan kurang bayar atau lebih bayar untuk tahun 2015 jika PT XYZ memiliki kredit pajak sebesar Rp20 juta?

- A. Kurang bayar Rp25 juta
- B. Kurang bayar Rp5 juta
- C. Lebih bayar Rp20 juta
- D. **Lebih bayar Rp7,5 juta**



12. PT MNO melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada beberapa pihak berikut:
- (1) 7 Januari mengirimkan barang kepada PT DEF, pembayaran diterima tanggal 5 Februari
 - (2) 13 Februari menerima pembayaran di muka dari PT GHI. Pengiriman barang dilakukan 16 Februari.
 - (3) 20 Maret menerima 20% pembayaran atas pemesanan PT JKL dan dilunasi tanggal 5 April. Pengiriman barang dilakukan bersamaan dengan pelunasan.
 - (4) 30 Mei menerima pesanan dari Pemda DKI, barang dikirimkan tanggal 3 Juni, tagihan dikirimkan tanggal 6 Juni, pemeriksaan dilaksanakan tanggal 11 Juni, dan pembayaran diterima tanggal 20 Juni.
 - (5) PT PRS merupakan pelanggan berkala yang sepanjang Juni melakukan pemesanan di tanggal 5, 8, 15 dan 29 Juni.

Tanggal faktur pajak untuk transaksi di atas yang paling tepat adalah:

- A. (1) 7 Januari, (4) 6 Juni, (5) 30 Juni
- B. (2) 13 Februari, (3) 20 Maret, (4) 20 Juni
- C. (1) 7 Januari, (2) 13 Februari, (4) 3 Juni
- D. (3) 5 April, (4) 30 Mei, (5) 29 Juni



13. PT KYT merupakan perusahaan kerajinan yang penjualannya berorientasi ekspor. Berikut adalah data yang dilaporkan PT KYT dalam SPT PPh Badan tahun 2014 dan 2015:

	SPT 2014	SPT 2015
PKP (termasuk keuntungan selisih kurs)	Rp1,5 miliar	Rp2,5 miliar
Keuntungan selisih kurs	Rp250 juta	Rp400 juta
PPh Pasal 22 yang dipotong pihak lain	Rp75 juta	Rp175 juta
Angsuran PPh Pasal 25	Rp175 juta	Rp300 juta
Tanggal pelaporan SPT	30 Maret 2015	30 Maret 2016

Berapa PPh Pasal 25 untuk masa Maret 2016 yang harus dibayar PT KYT?

- A. Rp19,8 juta
- B. Rp25 juta
- C. Rp29,2 juta
- D. Rp37,5 juta**
14. PT GEMA memiliki 90% pegawai dengan gaji rata-rata Rp100 juta setahun. Pilihan kebijakan terkait pegawai tersebut yang paling memberikan manfaat pajak untuk PT GEMA adalah:
- A. Memberikan tunjangan pajak dan beras 20 kg untuk karyawan
- B. Menanggung pajak karyawan dan beras 20 kg untuk karyawan
- C. Memberikan tunjangan pajak dan tunjangan kesehatan untuk karyawan**
- D. Menanggung pajak karyawan dan tunjangan kesehatan untuk karyawan



15. Berikut adalah beberapa transaksi PT ABC yang terjadi pada Januari 2015:

- Penerimaan deviden dari XYZ Ltd Singapura Rp50 juta
- Penerimaan *fee* dari PT PQR Rp25 juta
- Pembayaran deviden ke Mr X (Malaysia) Rp25 juta
- Pembayaran konsultasi PT DEF Rp200 juta
- Pembayaran pelatihan Tuan B Rp15 juta
- Pembayaran sewa gedung PT HIJ Rp120 juta
- Pembayaran bunga KLM Co (Australia) Rp20 juta

PT ABC memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 (abaikan *tax treaty*) masing-masing sebesar:

- A. **Rp4 juta dan Rp9 juta**
- B. Rp4,3 juta dan Rp5 juta
- C. Rp4,3 juta dan Rp9juta
- D. Rp4 juta dan Rp5 juta



16. Badan Usaha Tetap (BUT) ABC merupakan cabang dari ABC LTD yang melakukan penjualan mesin berat. Selama tahun 2015, BUT ABC memperoleh penghasilan kena pajak di Indonesia sebesar Rp2 miliar.

Pada tahun yang sama, ABC Ltd melakukan penjualan mesin berat secara langsung kepada PT XYZ di Indonesia senilai Rp250 juta. Atas penjualan ABC LTD ini, BUT ABC diminta oleh PT XYZ untuk memberikan jasa pemeliharaan mesin berat tersebut dengan *fee* sebesar Rp10 juta. Besarnya kredit pajak BUT ABC untuk tahun 2015 adalah Rp200 juta. Sesuai dengan kebijakan ABC LTD, laba setelah pajak BUT ABC akan dikirimkan ke kantor pusat seluruhnya.

Apa jenis pajak dan besarnya pajak yang terhutang atas pengiriman laba setelah pajak ke ABC LTD?

- A. **PPh Pasal 26 sebesar Rp339 juta**
- B. PPh pasal 26 sebesar Rp300 juta
- C. PPh Pasal 24 sebesar Rp337 juta
- D. PPh Pasal 24 sebesar Rp300 juta



17. Berikut adalah transaksi yang dilakukan PT DEF selama tahun 2015:

- Penjualan barang elektronik tunai ke pembeli PKP (Pengusaha Kena Pajak) sebesar Rp1 miliar.
- Penjualan kepada pembeli yang non-PKP senilai Rp200 juta (pembeli non-PKP tidak dapat mengkreditkan PPN yang dibayar).
- Penyerahan secara konsinyasi ke toko-toko elektronik rekanan senilai Rp2 miliar, dimana berdasarkan informasi dari rekanan barang senilai Rp1,5 miliar sudah terjual ke pembeli.
- Penggunaan TV dan lemari es hasil produksinya senilai Rp25 juta untuk digunakan di kantor pusatnya.
- Penyerahan 10 mesin cuci kepada beberapa panti asuhan di daerah Bogor senilai Rp40 juta.

Berapa penghasilan yang diakui dalam perhitungan PPh Badan dan berapa penyerahan yang terhutang PPN untuk tahun 2015?

- A. Rp2.700.000.000 dan Rp3.265.000.000**
- B. Rp3.265.000.000 dan Rp2.700.000.000
- C. Rp3.265.000.000 dan Rp3.200.000.000
- D. Rp3.200.000.000 dan Rp3.265.000.000



18. X Corp suatu perusahaan yang didirikan di Negara X (dengan tarif pajak tinggi) memproduksi suatu barang dengan biaya Rp200. X Corp menjual barang tersebut ke Y Corp (pihak berelasi di negara dengan tarif pajak rendah) dengan harga Rp250. Y Corp tanpa menambahkan *value added* apapun kemudian menjual produk tersebut ke *unrelated customer* dengan harga Rp300. Diketahui *gross margin* dari distributor independen untuk produk sejenis adalah 10%.

Harga wajar penjualan produk dari X Corp kepada Y Corp jika menggunakan *resale price method* adalah:

- A. Rp220
 - B. Rp270**
 - C. Rp275
 - D. Rp330
19. Dalam SPT PPh Pasal 21 Masa Februari 2015, terdapat pajak terutang sebesar Rp200.000.000. Pembayaran pajak terutang ini dilakukan pada 5 Mei 2015 dan SPT dilaporkan pada 6 Mei 2015. Sanksi yang akan dikenakan atas keterlambatan ini adalah:
- A. Bunga Rp8.000.000 dan denda Rp200.000
 - B. Bunga Rp8.000.000 dan denda Rp100.000**
 - C. Bunga Rp4.000.000 dan denda Rp200.000
 - D. Bunga Rp4.000.000 dan denda Rp100.000



20. Seorang tenaga pemasaran di BANK ABC memperoleh penghasilan pada Januari sebesar Rp10.000.000 dan Februari Rp12.000.000. Yang bersangkutan memiliki NPWP dan telah membuat pernyataan hanya memperoleh penghasilan dari BANK ABC.

Berapa PPh yang harus dipotong di bulan Februari jika statusnya menikah tetapi belum mempunyai anak dan tanggungan lainnya?

- A. Rp300.000
B. Rp550.000
C. Rp137.500
D. Rp225.000
21. PT GUNA (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT AGEN selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT MEDIA (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000. Rincian tagihan PT AGEN kepada PT GUNA terdiri atas:
- Jasa pembuatan materi iklan Rp100.000.000;
 - *Fee* agen Rp5.000.000;
 - Biaya pemasangan iklan Rp150.000.000 (bukti pembayaran dari PT AGEN kepada PT MEDIA dilampirkan dalam tagihan).

Berapa PPh yang harus dipotong oleh PT GUNA atas pembayaran kepada PT AGEN?

- A. Rp5.100.000
B. Rp2.100.000
C. Rp100.000
D. Rp5.000.000



22. PT MKM mengumumkan dividen tahun 2014 sebesar Rp1.000.000.000. Pemegang saham PT MKM terdiri atas:

- PT MK	25%
- PT KM	5%
- Koperasi Karyawan PT MKM	2%
- Yayasan BK	30%
- Santoso (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)	38%

Atas dividen kepada Santoso, PT MKM memotong PPh sebesar:

- A. **Rp38.000.000 dan bersifat final**
 - B. Rp57.000.000 dan merupakan kredit pajak bagi Santoso
 - C. Rp76.000.000 dan merupakan kredit pajak bagi Santoso
 - D. Rp57.000.000 dan bersifat final
23. Ratna (Wajib Pajak Dalam Negeri) adalah seorang karyawan pada Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Dalam tahun 2014, yang bersangkutan memperoleh penghasilan bruto dari tempat kerjanya sebesar Rp300.000.000, termasuk penghasilan yang diterima dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar Rp60.000.000. Ratna tidak mengikuti Program Pensiun dan Jaminan Hari Tua.

Pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Ratna akan mencantumkan kurang bayar PPh sebesar:

- A. Nihil
- B. Rp26.455.000
- C. Rp34.500.000
- D. **Rp37.425.000**



24. Penghasilan bruto PT SUBUR berasal dari penjualan barang dalam tahun 2014 adalah Rp40.000.000.000 dan penghasilan neto fiskalnya Rp2.400.000.000. Kredit pajak disebabkan adanya penjualan barang kepada instansi pemerintah sebesar Rp10.000.000.000 dan PPh Pasal 25 selama tahun 2014 sebesar Rp345.000.000.

Jika tidak ada kompensasi kerugian di tahun 2014, berapa PPh yang kurang (lebih) dibayar untuk tahun 2014?

- A. **Kurang bayar Rp69.000.000**
- B. Kurang bayar Rp105.000.000
- C. Lebih bayar Rp495.000.000
- D. Lebih bayar Rp95.000.000
25. Perhitungan SPT PPh Badan PT MAKMUR Tahun Pajak 2014 adalah sebagai berikut:
- PPh yang terutang Rp9.500.000.000
 - Kredit Pajak PPh Pasal 23 Rp3.500.000.000

Jika tidak ada penghasilan tidak teratur, maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015 adalah:

- A. Rp1.000.000.000
- B. **Rp500.000.000**
- C. Rp200.000.000
- D. Rp1.200.000.000



26. PT INDO menerima pembagian dividen dari SINGCO Pte Ltd, Singapura, sebesar Rp1.000.000.000 pada tanggal 11 Agustus 2015. Atas pembayaran dividen tersebut, dipotong PPh di Singapura sebesar 10%.

Bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi di atas?

- A. Penghasilan dividen merupakan objek pajak karena UU PPh menganut asas *world wide income* dan tidak ada kredit pajak atas penghasilan yang dipotong pajak di Singapura
 - B. Penghasilan dividen bukan merupakan objek pajak karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan di Singapura dan tidak ada kredit pajak atas penghasilan yang dipotong pajak di Singapura
 - C. **Penghasilan dividen merupakan objek pajak karena UU PPh menganut asas *world wide income* dan semua pajak yang dipotong di Singapura dapat dikreditkan di SPT Tahunan PPh di Indonesia**
 - D. Penghasilan dividen merupakan objek pajak karena UU PPh menganut asas *world wide income* dan pajak yang dipotong di Singapura merupakan batas maksimal yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan PPh di Indonesia
27. PT LESTARI, yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan berkedudukan di sebuah kawasan berikat, memiliki jenis usaha industri keramik. Jika PT LESTARI membeli barang modal berupa mesin dari PT ANDAL di DPIL, maka PT LESTARI:
- A. **Memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut**
 - B. Memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
 - C. Memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah
 - D. Tidak dikenakan PPN



28. Dalam pembukuan PT NAM (PKP Industri Tekstil yang dikukuhkan sejak 1 Mei 2011) pada bulan Juli 2015, ditemukan catatan penjualan aset tetap berupa kendaraan dengan rincian berikut:

JENIS	TAHUN PEROLEHAN	PENGGUNAAN	HARGA JUAL
Truk	20 April 2010	Produksi	Rp80.000.000
Sedan	22 Juli 2014	Pemasaran	Rp200.000.000
Mobil boks	9 Agustus 2014	Distribusi	Rp100.000.000

Bagaimana PPN atas penjualan ketiga jenis kendaraan tersebut?

- A. Terutang PPN sebesar Rp38.000.000
 - B. Terutang PPN sebesar Rp30.000.000
 - C. Terutang PPN sebesar Rp18.000.000**
 - D. Terutang PPN sebesar Rp10.000.000
29. Pada tanggal 24 Juli 2015, PT MOBI (*dealer* kendaran bermotor bekas yang sudah dikukuhkan sebagai PKP) menjual mobil sedan dengan harga jual Rp150.000.000.

Bagaimana PPN atas penjualan mobil ini?

- A. Dikenai PPN sebesar 10% x Rp150.000.000
- B. Dikenai PPN sebesar 10% x 10% x Rp150.000.000
- C. Tidak dikenai PPN**
- D. Dikenai PPN sebesar 10% x 20% x Rp150.000.000



30. Kebijakan PT ABC adalah menjual produknya dengan margin keuntungan sebesar 25% dari harga pokok penjualan (HPP). Pada bulan Desember 2015, PT ABC menjual produknya kepada pelanggan sebesar Rp250 juta (harga jual) dan menyumbangkan produknya kepada panti asuhan senilai Rp100 juta (HPP).

Berapa dasar pengenaan PPN untuk penyerahan bulan Desember 2015?

- A. Rp100 juta
 - B. Rp250 juta
 - C. Rp350 juta**
 - D. Rp375 juta
31. Berikut ini adalah karakteristik pedagang eceran dalam UU PPN, kecuali:
- A. Melakukan penyerahan melalui suatu tempat penjualan eceran, seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya
 - B. Penjualan dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang
 - C. Pedagang eceran termasuk WP yang wajib menggunakan E-Faktur**
 - D. Pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa BKP yang dibelinya



32. *Thin capitalisation* adalah:

- A. Struktur permodalan perusahaan dengan komposisi modal sendiri lebih besar daripada pinjaman
- B. Struktur kepemilikan perusahaan dengan komposisi warga negara asing lebih banyak daripada WNI
- C. **Struktur permodalan perusahaan dengan komposisi pinjaman lebih besar daripada modal sendiri**
- D. Struktur aset perusahaan dengan komposisi aset tidak lancar lebih besar daripada aset lancar

33. Salah satu hak wajib pajak adalah mengajukan banding atas suatu keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pengajuan banding hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak melakukan proses:

- A. Arbitrase
- B. Litigasi
- C. Gugatan
- D. **Keberatan**



34. Penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha bukan merupakan objek pajak penghasilan apabila:
- A. Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha sudah menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun
 - B. Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha belum menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun
 - C. Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha sudah menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi 10 tahun
 - D. **Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha belum menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi 10 tahun**
35. Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat diajukan terhadap:
- A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - B. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 - C. **Penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan perpajakan**
 - D. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



36. Berikut ini adalah penerapan penghitungan PPh bagi UMKM:
- A. PPh dihitung setiap bulan dengan mengalikan penghasilan bruto dalam satu bulan tersebut dengan tarif 2,5%, PPh bersifat final, dan pengeluaran atau biaya tidak diperhitungkan
 - B. **PPh dihitung setiap bulan dengan mengalikan penghasilan bruto dalam satu bulan tersebut dengan tarif 1%, PPh bersifat final, dan pengeluaran atau biaya tidak diperhitungkan**
 - C. PPh dihitung setiap bulan dengan menghitung penghasilan neto dalam satu bulan tersebut dan mengalikannya dengan tarif 1% dan PPh bersifat final
 - D. PPh dihitung setiap bulan dengan menghitung penghasilan neto dalam satu bulan tersebut dan mengalikannya dengan tarif 2,5% dan PPh bersifat final
37. Sdr. BEDU memperoleh penghasilan bruto sebagai pegawai tetap pada PT ANGKASA pada bulan September 2017 sebesar Rp30.000.000 dan telah bekerja di PT ANGKASA sejak tahun 2015.

Berapa PPh Pasal 21 atas penghasilan Sdr. BEDU di bulan September yang dipotong oleh PT ANGKASA jika ia belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan serta membayar premi JHT atas tanggungan sendiri sebesar Rp200.000?

- A. Rp1.465.000
- B. Rp3.825.000
- C. Rp4.318.750
- D. **Rp4.075.000**



38. PT SEJAHTERA menggunakan jasa pengacara di Singapura karena sedang menghadapi masalah peradilan di negara tersebut. Pengacara tersebut tidak datang ke Indonesia, komunikasi dilakukan melalui korespondensi *on-line* Indonesia-Singapura. Pengacara tersebut telah melengkapi persyaratan untuk penerapan *Tax Treaty*.

Dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf (i) *Tax Treaty* Indonesia-Singapura, tercantum pengertian *Permanent Establishment* sebagai berikut, "The term "permanent establishment" shall include especially the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the activities continue within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 90 days within a twelve-month period".

Ketika melakukan pembayaran *fee* atas jasa tersebut sebesar Rp200.000.000, maka PT SEJAHTERA akan:

- A. Melakukan pemotongan PPh sebesar Rp40.000.000
 - B. Melakukan pemotongan PPh sebesar Rp30.000.000
 - C. Melakukan pemotongan PPh sebesar Rp20.000.000
 - D. Melakukan pembayaran utuh tanpa melakukan pemotongan PPh**
39. Untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham, yaitu sebesar:
- A. 3 : 1
 - B. 4 : 1**
 - C. Tidak ada peraturan yang spesifik
 - D. Peraturan baru belum diterbitkan



40. BUT BINA adalah BUT yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi usaha jasa konstruksi besar. Penghasilan bruto tahun 2014 berdasarkan metode persentase penyelesaian adalah Rp100.000.000.000, dan kas yang diterima dari pelanggan selama tahun 2014 adalah Rp96.000.000.000. Laba sebelum pajak tahun 2014 sebesar Rp6.000.000.000 dan penghasilan neto fiskal Rp6.800.000.000.

Jika tidak ada kompensasi kerugian di tahun 2014 dan BUT BINA tidak dapat menerapkan *Tax Treaty*, maka total PPh terutang BUT BINA (PPh Final dan *Branch Profit Tax*) tahun 2014 adalah:

- A. Rp4.080.000.000
 - B. Rp4.200.000.000
 - C. Rp4.240.000.000**
 - D. Rp4.360.000.000
41. PT ABADI merupakan pemilik 60% saham PT BIJAK dan 30% saham PT CINTA. PT BIJAK mempunyai penyertaan saham sebanyak 40% pada PT DELTA. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT DELTA membeli aset dari PT CINTA dengan harga Rp1.000.000.000 yang mana nilai wajar aset tersebut menurut pengamatan pasar adalah Rp1.200.000.000. Aset diestimasi memiliki masa manfaat 10 tahun tanpa nilai residu dan menurut ketentuan perpajakan termasuk Kelompok 2.

Berapa penyusutan fiskal tahun 2014 apabila entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus?

- A. Rp100.000.000
- B. Rp120.000.000
- C. Rp125.000.000**
- D. Rp150.000.000



42. PT SEPAKAT adalah PKP industri sepatu yang dalam bulan Juli 2015 sedang membangun sendiri gedung untuk gerai seluas 480 m². Selama bulan Juli 2015, perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp160.000.000 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan sebesar Rp12.000.000. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT SEPAKAT:
- A. Dikenai PPN sebesar 10% x Rp160.000.000
 - B. Dikenai PPN sebesar 10% x 20% x Rp160.000.000**
 - C. Dikenai PPN sebesar 10% x 40% x Rp160.000.000
 - D. Dikenai PPN sebesar 10% x 40% x (Rp160.000.000 - Rp12.000.000)
43. YAYASAN UNIVERSITAS PINTAR mempunyai Sisa Lebih Tahun Pajak 2013 sebesar Rp20.000.000.000. Atas Sisa Lebih Tahun 2013 ini, maka:
- A. Dikenakan PPh sebesar 25%
 - B. Dikenakan PPh sebesar 12,5%
 - C. Dikecualikan dari objek PPh dengan persyaratan tertentu**
 - D. Penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Final



44. Pernyataan yang tidak tepat mengenai fasilitas penurunan tarif PPh 5% adalah:
- A. Hanya berlaku untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka
 - B. Diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak
 - C. **Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 7% (tujuh persen) dari keseluruhan saham yang disetor**
 - D. Wajib Pajak diharuskan membuat Surat keterangan dari Biro Administrasi Efek yang dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan bahwa keadaan tersebut telah ada dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak
45. Pernyataan berikut merupakan perbedaan Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak, yaitu:
- A. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang terutang pajak
 - B. Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha adalah sama saja, namun istilah Pengusaha digunakan untuk orang pribadi dan istilah Pengusaha Kena Pajak digunakan untuk badan usaha
 - C. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang kena pajak penghasilan
 - D. **Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak yang dikenai PPN**



46. PT MAJU adalah pabrik plastik yang berkedudukan di daerah Kawasan Berikat dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Di masa awal pendirian perusahaan, PT MAJU membeli barang modal berupa mesin-mesin dari daerah pabean Indonesia lainnya.

Berkenaan dengan peraturan PPN, apakah fasilitas yang diperoleh oleh PT MAJU?

- A. **Fasilitas PPN tidak dipungut**
 - B. Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
 - C. Fasilitas PPN ditanggung Pemerintah
 - D. Fasilitas tidak dikenakan PPN
47. Jasa di bidang perbankan dikecualikan dari pengenaan PPN, namun sebagian jasa yang disediakan oleh bank tetap terutang PPN, yaitu:
- A. Melakukan kegiatan anjak piutang
 - B. Memberikan jasa pembiayaan
 - C. **Menyewakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga**
 - D. Menerbitkan surat pengakuan utang



48. PT DAYA (PKP) adalah perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan menagih jasa penyediaan lima orang petugas keamanan kepada PT ANUGERAH sebesar Rp7.500.000. Petugas keamanan telah dipekerjakan di PT ANUGERAH dan bertanggung jawab langsung kepada PT ANUGERAH.

Bagaimana kewajiban PPN terkait penyerahan jasa tersebut?

- A. PT DAYA wajib memungut PPN karena tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari keamanan tersebut
 - B. **PT DAYA tidak wajib memungut PPN karena tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari keamanan tersebut**
 - C. PT DAYA wajib memungut PPN karena para keamanan bertanggung jawab langsung terhadap hasil kerjanya
 - D. PT DAYA tidak wajib memungut PPN karena nilai penyerahan tidak lebih dari Rp10.000.000
49. Ibu Rita, seorang ibu rumah tangga, memenangkan hadiah uang tunai sejumlah Rp100.000.000 yang diselenggarakan pada suatu acara promosi produk pembersih.

Atas hadiah uang tersebut, berapa besarnya PPh yang harus dipotong oleh pihak penyelenggara?

- A. Rp2.000.000
- B. Rp5.000.000
- C. **Rp25.000.000**
- D. Tidak dipotong PPh



50. Pernyataan berikut merupakan pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya, kecuali:
- A. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil
 - B. Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh perusahaan di tempat kerja, meliputi pegawai bagian pemasaran, pengiriman, dan petugas dinas luar lainnya**
 - C. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya
 - D. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
51. Bagaimanakah perlakuan atas pembetulan sendiri atas SPT Masa oleh Wajib Pajak yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar?
- A. Dikenai sanksi 2% per bulan atas jumlah pajak yang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan
 - B. Dikenai sanksi 2% per bulan atas jumlah pajak yang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan**
 - C. Dikenai sanksi 4% per bulan atas jumlah pajak yang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan
 - D. Dikenai sanksi 4% per bulan atas jumlah pajak yang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan



52. Berikut ini adalah karakteristik dari koreksi fiskal positif, kecuali:

- A. **Koreksi akan mengakibatkan penghasilan (laba) fiskal lebih kecil daripada laba komersial**
- B. Koreksi akan mengakibatkan penghasilan (laba) fiskal lebih besar daripada laba komersial
- C. Koreksi positif disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban yang tidak diperkenankan
- D. Koreksi positif disebabkan oleh pengakuan penghasilan yang belum diakui dalam laporan keuangan komersial

53. Sebuah PKP melakukan penyerahan dengan data berikut:

- Penyerahan terutang PPN: Rp100.000.000.
- Penyerahan yang tidak terutang PPN: Rp25.000.000.
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN: Rp15.000.000

Data pembelian adalah sebagai berikut:

- Pembelian yang berkaitan dengan penyerahan terutang PPN: Rp60.000.000.
- Pembelian yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN: Rp10.000.000.
- Pembelian yang berkaitan dengan yang dibebaskan dari pengenaan PPN: Rp5.000.000.

Berapa pajak masukan yang dapat dikreditkan?

- A. **Rp6.000.000**
- B. Rp7.000.000
- C. Rp5.000.000
- D. Rp6.500.000



54. Pemicu pemajakan WP luar negeri adalah:

- A. **Pertalian ekonomis**
- B. Kewarganegaraan
- C. Tujuan kedatangan
- D. Jumlah kedatangan

55. Terdapat tiga jenis pendapatan yang diatur dalam *tax treaty*, yaitu:

- A. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak pada ketentuan pajak negara domisili; penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*; penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada negara sumber penghasilan
- B. **Penghasilan yang dapat dikenakan pajak pada ketentuan domestik negara sumber penghasilan; penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*; penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada negara sumber penghasilan**
- C. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak pada ketentuan domestik negara sumber penghasilan; penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*; penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada kedua negara
- D. Penghasilan yang tidak dapat dikenakan pajak pada ketentuan domestik negara sumber penghasilan; penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*; penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada negara sumber penghasilan



56. Apakah yang dimaksudkan dengan *treaty shopping*?
- A. **Perilaku WP luar negeri untuk memanfaatkan *tax treaty* yang paling menguntungkan dengan merekayasa kegiatannya**
 - B. Perilaku WP luar negeri untuk memanfaatkan insentif pajak dari negara setempat
 - C. Perilaku WP luar negeri untuk memanfaatkan insentif pajak dari negara asal
 - D. Perilaku WP luar negeri untuk memanfaatkan *tax treaty* melalui transaksi riilnya
57. Mana yang termasuk contoh kondisi terjadi *juridical double taxation*?
- A. Pajak yang dikenakan atas dividen yang diterima Ibu Ira dari investasinya PT SUMBER
 - B. Pajak yang harus dibayar saat Sdr. Ani menerima gaji dan Sdr. Ani harus membayar PPN atas penggunaan gajinya yang dipakai untuk membeli tiket wisata ke Belanda
 - C. **Pajak yang dikenakan atas dividen yang diterima PT SINAR dari anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura**
 - D. Pajak yang harus dibayar atas transaksi jasa perbaikan AC
58. Contoh penerapan P3B dengan menggunakan *relief-at-source method* adalah:
- A. Dilakukannya permohonan pengembalian kembali (*refund*)
 - B. **Digunakannya sarana administrasi Surat Keterangan Domisili (SKD)**
 - C. Dilakukannya pembayaran pajak di negara sumber penghasilan
 - D. Dilakukannya pembayaran pajak saat menerima penghasilan



59. Proses membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak berelasi (*related parties*) dengan harga barang dalam transaksi yang pihak-pihak yang tidak berelasi dalam suatu kondisi yang sebanding, merupakan metode penentuan harga transfer:
- A. ***Comparable uncontrolled price***
 - B. *Resale price method*
 - C. *Profit split method*
 - D. *Transactional net margin method*
60. Metode penentuan harga transfer yang tepat digunakan ketika perusahaan ingin menjual barang setengah jadi kepada pihak-pihak berelasi adalah:
- A. *Comparable uncontrolled price*
 - B. *Resale price method*
 - C. ***Profit split method***
 - D. *Transactional net margin method*
61. Ketika melakukan penelitian Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak, petugas pajak menemukan adanya kesalahan, maka sarana yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak/atau sanksi administrasi adalah:
- A. Surat Setoran Pajak (SSP)
 - B. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
 - C. **Surat Tagihan Pajak (STP)**
 - D. Surat Pemberitahuan (SPT)



62. Salah satu hak Wajib Pajak mengajukan banding atas suatu Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pengajuan banding hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan proses:
- A. Arbitrase
 - B. Litigasi
 - C. Gugatan
 - D. **Keberatan**
63. Jika PT MAWAR melaporkan SPT PPh Pasal 25 untuk bulan Mei 2016 pada tanggal 23 Juli 2016.
Berapa jumlah sanksi administrasi denda yang akan dikenakan kepada PT MAWAR?
- A. **Rp100.000**
 - B. Rp200.000
 - C. Rp500.000
 - D. Rp1.000.000
64. Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp25.000.000 yang diterbitkan tanggal 5 November 2016 dengan batas akhir pelunasan tanggal 4 Desember 2016. Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah tetap sebesar Rp5.000.000 setiap bulan.
Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
- A. Angsuran ke-1 : 2% X Rp25.000.000 dan angsuran ke-2 : 2% X Rp5.000.000
 - B. Angsuran ke-1 : 2% X Rp25.000.000 dan angsuran ke-2 : 2% X Rp18.000.000
 - C. Angsuran ke-1 : 2% X Rp25.000.000 dan angsuran ke-2 : 4% X Rp16.000.000
 - D. **Angsuran ke-1 : 2% X Rp25.000.000 dan angsuran ke-3 : 2% X Rp20.000.000**



65. Nona A, warga negara Indonesia, adalah seorang pegawai Bank BNI, saat ini sedang menjalani tugas belajar di Selandia Baru dengan memperoleh beasiswa dari Pemerintah Selandia Baru. Selama itu Nona A tidak penghasilan apa pun dari Indonesia.

Apakah Nona A wajib menyampaikan SPT Tahunan WP OP di Indonesia?

- A. **Tidak, karena Nona A bukan subjek pajak maupun wajib pajak karena tidak berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia**
- B. Tidak, karena Nona A sudah menyampaikan SPT di Selandia Baru
- C. Wajib, Karena Nona A menerima penghasilan yang berasal dari Indonesia
- D. Wajib, Karena Nona A masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia

66. Bagaimana perlakuan atas sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku?

- A. Merupakan pembayaran pajak yang bisa dikreditkan
- B. Merupakan pembayaran pajak yang bisa dikreditkan sebagian
- C. **Merupakan pembayaran pajak yang tidak bisa dikreditkan**
- D. Merupakan pembayaran pajak yang dapat dikreditkan pada tahun yang sama dengan tahun terhutang

67. Berikut ini yang obyek pajak penghasilan Pasal 23 adalah:

- A. Penghasilan sewa pesawat udara dalam negeri
- B. **Penghasilan sewa alat derek dalam negeri**
- C. Penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri
- D. Penghasilan perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri



68. Berikut adalah contoh objek pajak, kecuali:
- A. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - B. **Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa**
 - C. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 - D. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
69. Berikut ini adalah karakteristik pedagang eceran dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali:
- A. Melakukan penyerahan melalui suatu tempat penjualan eceran, seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya
 - B. Penjualan dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang
 - C. **Pedagang eceran termasuk wajib pajak yang wajib menggunakan E-Faktur**
 - D. Pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya



70. Berikut adalah beberapa jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran perhitungan peredaran usaha, kecuali:
- A. Pengujian arus barang
 - B. **Pengujian arus PPN**
 - C. Pengujian arus piutang
 - D. Pengujian arus utang
71. Berikut ini yang merupakan perlakuan tepat untuk melaporkan PPh final yang sudah dibayar dalam SPT tahunan adalah:
- A. Tidak usah dilaporkan karena sifat PPh nya adalah PPh Final
 - B. **Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dilaporkan pada SPT 1770 Lampiran III Bagian A**
 - C. Harus dilaporkan dalam SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan saja
 - D. Bagi Wajib Pajak Badan dilaporkan pada SPT 1771 Lampiran III dan dipindahkan ke lembar induk SPT huruf C
72. Berikut adalah beberapa jenis biaya tenaga kerja yang dikeluarkan PT SENTOSA untuk karyawannya.
- Manakah yang sebaiknya perusahaan minimalis pengeluarannya?
- A. Uang pulsa
 - B. **Voucher bensin**
 - C. Uang penggantian biaya rumah sakit
 - D. Biaya makan di kantor



73. Berikut adalah beberapa jenis biaya tenaga kerja yang dikeluarkan PT PELANGI untuk karyawannya.

Biaya manakah yang menyebabkan timbulnya biaya pajak tangguhan?

- A. **Biaya pensiun**
- B. Biaya THR
- C. Biaya beras
- D. Biaya pengurusan visa staf ahli dari luar negeri

74. Jika CV SANJAYA, pengelola SPBU Cimanggis, ingin memberikan bonus insentif kepada karyawannya, maka sebaiknya diberikan dalam bentuk:

- A. Rekreasi keluarga karyawan
- B. Uang bonus
- C. Hari libur
- D. **Voucher perjalanan wisata**

75. Jika Ibu Titis mendapatkan hadiah juara memasak senilai Rp.20.000.000, maka hadiah tersebut akan dipotong pajak:

- A. **PPh pasal 21**
- B. PPh pasal 22
- C. PPh pasal 23
- D. PPh pasal 4 ayat 2



76. Berikut ini adalah transaksi pembelian 10 unit mesin blender secara kredit dengan menggunakan metode perpetual. Harga blender per unit adalah Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN)

Bagaimana penjournalannya?

- A. Persediaan Rp18.000.000
 PPN masukan Rp4.000.000
 Utang dagang Rp22.000.000
- B. **Persediaan Rp20.000.000**
 PPN masukan Rp2.000.000
 Utang dagang Rp22.000.000
- C. Pembelian Rp20.000.000
 PPN masukan Rp2.000.000
 Utang dagang Rp22.000.000
- D. Pembelian Rp18.000.000
 PPN masukan Rp4.000.000
 Utang dagang Rp22.000.000



77. Berikut ini adalah transaksi pengembalian dua unit mesin blender yang dibeli secara kredit dengan menggunakan metode perpetual. Harga blender per unit adalah Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN).

Bagaimana penjournalannya?

- | | | |
|----|---------------------|--------------------|
| A. | Utang dagang | Rp4.400.000 |
| | PPN masukan | Rp400.000 |
| | Persediaan | Rp4.000.000 |
| B. | Utang dagang | Rp4.000.000 |
| | PPN masukan | Rp400.000 |
| | Persediaan | Rp3.600.000 |
| C. | Utang dagang | Rp4.400.000 |
| | PPN masukan | Rp400.000 |
| | Pembelian | Rp4.000.000 |
| D. | Utang dagang | Rp4.000.000 |
| | PPN masukan | Rp400.000 |
| | Pembelian | Rp3.600.000 |

78. Berikut ini adalah impor barang yang dikecualikan dari PPh Pasal 22:

- A. **Barang untuk keperluan pameran atau keperluan lain yang bersifat sementara**
- B. Barang untuk bahan baku produksi sepatu
- C. Barang untuk perdagangan *online shop*
- D. Barang untuk perdagangan pedagang eceran



79. Berikut ini adalah keadaan dimana Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak , kecuali:
- A. Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal
 - B. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang
 - C. Mengalami kerugian fiskal yang jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan
 - D. **Mengalami kerugian fiskal yang jumlahnya sama dengan perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan**
80. Dari beberapa kondisi di bawah ini, manakah yang termasuk dalam tindakan *tax evasion*:
- A. PT BUNGA yang memiliki tiga cabang perusahaan di lokasi yang berbeda (Bogor, Bekasi, dan Depok), melakukan pemusatan kewajiban PPN di kantor pusat yaitu di Batam
 - B. PT JAYA melakukan penjualan kepada anak perusahaan yang berlokasi di Singapura dengan harga yang sama dengan penjualan kepada anak perusahaan di Malaysia, namun berbeda dengan penjualan ke pihak ketiga di Amerika Serikat dan Australia
 - C. **PT MERDEKA berkantor pusat di Tangerang dan memiliki cabang di Bekasi. PT MERDEKA belum mengukuhkan diri sebagai PKP karena omzet setahun kantor pusat dan kantor cabang masing-masing Rp4.000.000.000 dan Rp3.500.000.000**
 - D. PT PIJAR melakukan investasi di Negara X yang memiliki tarif atas penghasilan dividen lebih rendah daripada di Indonesia



81. Berikut adalah beberapa biaya operasional yang terjadi di PT PUTIH. Terkait dengan aspek pajak, biaya manakah yang harus PT PUTIH hindari?
- A. Biaya sewa mobil
 - B. Biaya sewa genset
 - C. **Biaya sewa ruko**
 - D. Biaya sewa AC
82. Berikut adalah beberapa biaya operasional yang terjadi di PT GERHANA. Terkait dengan aspek pajak, biaya manakah yang harus PT GERHANA minimalisir?
- A. Biaya bensin mobil sewaan
 - B. Biaya perbaikan genset sewaan
 - C. **Biaya perbaikan CCTV di ruko sewaan**
 - D. Biaya perbaikan mesin



83. Penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha bukan merupakan objek pajak penghasilan apabila:
- A. Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha sudah menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun
 - B. Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha belum menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun
 - C. Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha sudah menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi 10 tahun
 - D. **Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilaksanakan selama perusahaan pasangan usaha belum menjual saham di bursa efek dan penyertaan modal modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka waktu tidak melebihi 10 tahun**
84. Berapakah tarif penebusan harta untuk *Tax Amnesty* tahap II untuk Wajib Pajak Non-UMKM?
- A. 5%
 - B. 3%
 - C. **2%**
 - D. 1%



85. Mana yang wajib menyampaikan SPT Masa?
- A. Tuan D bekerja pada PT AAA sebagai pegawai bagian pemasaran
 - B. **Tuan E bekerja sebagai bendahara perguruan tinggi negeri**
 - C. Tuan F adalah PNS Pemkab ABC dan tidak ada penghasilan lain
 - D. Tuan G bekerja sebagai perawat pada Klinik Gigi Sehat
86. PT JKL memiliki kontrak perjanjian dengan MNO Ltd yang berkedudukan di Seoul, Korea. MNO Ltd menempatkan tiga stafnya di PT JKL selama enam bulan dan staf tersebut digaji langsung oleh PT JKL. Perjanjian juga menyatakan bahwa PT JKL berhak atas saran dan rekomendasi dari MNO Ltd apabila diperlukan. Atas perjanjian tersebut, PT JKL membayar Rp750.000.000 pada MNO Ltd.
- Disebut apakah pembayaran dari PT JKL kepada MNO Ltd tersebut?
- A. *Employment fee*
 - B. *Management fee*
 - C. *Consultant fee*
 - D. ***Technical fee***



87. Terdapat tiga jenis pendapatan yang diatur dalam *tax treaty*, yaitu:

- A. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak pada ketentuan pajak negara domisili, penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*, dan penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada negara sumber penghasilan
- B. **Penghasilan yang dapat dikenakan pajak pada ketentuan domestik negara sumber penghasilan, penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*, dan penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada negara sumber penghasilan**
- C. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak pada ketentuan domestik negara sumber penghasilan, penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*, dan penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada kedua negara
- D. Penghasilan yang tidak dapat dikenakan pajak pada ketentuan domestik negara sumber penghasilan, penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty*, dan penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak pada negara sumber penghasilan

88. Harga wajar dalam *transfer pricing* dikenal dengan istilah:

- A. *Long legs price*
- B. *Leg length price*
- C. ***Arm's length price***
- D. *Long hair price*

89. Manakah dari transaksi di bawah ini yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan?
- A. Impor daging sapi
 - B. **Penyerahan jasa persewaan kapal**
 - C. Penjualan kain ke perusahaan di kawasan berikat dengan tujuan untuk diekspor
 - D. Ekspor kerajinan tangan UMKM
90. Proses membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga barang dalam transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam suatu kondisi yang sebanding merupakan metode penentuan harga transfer apa?
- A. ***Comparable uncontrolled price***
 - B. *Resale price method*
 - C. *Profit split method*
 - D. *Transactional net margin method*



ESAI

1. Bejo adalah karyawan PT MAJU. Penghasilan bruto Bejo di tahun 2014 sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah Rp480.000.000, di mana Bejo membayar iuran pensiun/premi JHT/THT atas tanggungan sendiri sebesar Rp18.000.000. Bejo telah menikah dengan tanggungan 3 orang anak yang semuanya lahir sebelum tahun 2014. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT MAJU atas penghasilan Bejo tahun 2014 adalah Rp75.900.000.

Istri Bejo, Indah, adalah karyawan PT MANTAP dan memiliki NPWP sendiri. Penghasilan bruto Indah di tahun 2014 sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah Rp420.000.00, di mana Indah membayar iuran pensiun/premi JHT/THT atas tanggungan sendiri sebesar Rp15.000.000. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT MANTAP atas penghasilan Indah tahun 2014 adalah Rp63.675.000.

Diminta

- a. Dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2014, tentukan PPh yang kurang (lebih) dibayar, baik dalam SPT Bejo maupun Indah atau keduanya.
- b. Jika terjadi kurang bayar, kapan kurang bayar tersebut harus dilunasi dan kapan SPT harus disampaikan?
- c. Jika terjadi kurang bayar, apakah ada cara yang dapat dilakukan agar pada tahun mendatang tidak lagi terjadi kurang bayar, mengingat penghasilan pasangan suami-istri tersebut hanya berasal dari pekerjaan sebagai karyawan?



Jawab:

- a. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh, penghasilan suami-istri dikenai pajak terpisah apabila dikehendaki oleh istri yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Perhitungan pajaknya didasarkan pada penghasilan suami-istri yang digabung dan pajak dikenakan berdasarkan penghasilan neto suami-istri.

SPT Tahunan

	Bejo (K/3)	Indah (TK/0)	Total (K/I/3)
Penghasilan bruto	480.000.000	420.000.000	900.000.000
Pengurangan:			
-Biaya jabatan	6.000.000	6.000.000	12.000.000
-luran pensiun/JHT/THT	18.000.000	15.000.000	33.000.000
Jumlah	24.000.000	21.000.000	45.000.000
Penghasilan neto	456.000.000	399.000.000	855.000.000
PTKP	(32.400.000)	(24.300.000)	(56.700.000)
PhKP	423.600.000	374.700.000	798.300.000
PPh Terutang	98.394.667	86.095.333	184.490.000
PPh Pasal 21	(75.900.000)	(63.675.000)	(139.575.000)
Kurang bayar	22.494.667	22.420.333	44.915.00

- b. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 UU KUP, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Sesuai dengan pasal 3 ayat 3 huruf B UU KUP, batas waktu penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

- c. Agar tidak terjadi kurang bayar PPh pasangan suami-istri tersebut untuk tahun-tahun mendatang, sebaiknya istri mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP istri akan mengakibatkan istri tidak lagi memilih melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri.

Dalam kondisi ini, sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU PPh, penghasilan istri tidak digabung dengan penghasilan suaminya yang dianggap final karena penghasilan istri berasal dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.



2. Badan Usaha Tetap (BUT) KAKIKUDA Co Ltd adalah BUT yang bergerak di bidang perdagangan umum yang kantor pusatnya berkedudukan di Jepang. BUT ini telah memenuhi persyaratan untuk penerapan *Tax Treaty* Indonesia-Jepang. Ikhtisar keuangan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Peredaran usaha	Rp25.178.000.000
- Harga pokok penjualan	Rp20.130.000.000
- Beban operasi	Rp2.413.360.000
- Kerugian penjualan kendaraan operasional	Rp2.640.000

Dalam beban operasi, terdapat:

- Pembayaran royalti ke Kantor Pusat	Rp240.000.000
- PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan	Rp6.400.000

Seluruh penghasilan BUT setelah pajak, dikirim ke kantor pusatnya di Jepang.

Dalam Protokol *Tax Treaty* Indonesia-Jepang No. 5 huruf (a) dinyatakan, “Nothing in the Agreement shall be construed as preventing Indonesia from imposing in accordance with the provisions of Article 7 thereof such part of the tax on interest, dividend and royalty (Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty) as is relevant to subparagraph b of Article 3b of Dividend Tax Regulations of 1959 as amended and supplemented by Law No. 10 of 1970, so far as it has not been modified since the date of signature of this Protocol, or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character, on the earnings (other than those derived from the operation of ships or aircraft in international traffic) of a company being a resident of Japan which has a permanent establishment in Indonesia; but such tax shall not exceed 10 percent of the amount of such earnings, except where such earnings are those derived by such company under its oil or natural gas production-sharing contracts with the Government of the Republic of Indonesia or the relevant state oil company of Indonesia.”

NASKAH UJIAN CHARTERED ACCOUNTANT (CA)**TAHUN 2016-2017****MANAJEMEN PERPAJAKAN****Diminta:**

- Tentukan jumlah pajak yang harus dibayar Badan Usaha Tetap (BUT) Kakikuda, Co. Ltd. atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia tahun 2014.
- Adakah cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan? Jelaskan secara rinci.
- Jika dapat dikurangi, berapakah penghematan pajak yang dapat diperoleh?

Jawab:

- Perhitungan PPh BUT KAKIKUDA tahun 2014

	Peredaran usaha		25.178.000.000
	Harga pokok penjualan		(20.130.000.000)
	Laba kotor		5.048.000.000
	Biaya usaha		(2.413.360.000)
	Laba usaha		2.634.640.000
	Rugi penjualan kendaraan		(2.640.000)
	Penghasilan neto komersial		2.632.000.000
	Koreksi fiskal:		
	Pembayaran royalti ke Kantor Pusat	240.000.000	
	PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan	6.400.000	246.400.000
	Penghasilan neto fiskal		2.878.400.000
	Kompensasi kerugian		-
	Penghasilan Kena Pajak		2.878.400.000
	PPh terutang = 25%		719.600.000
	Penghasilan Kena Pajak -/- PPh terutang		2.158.800.000
	PPh Pasal 26 (4) = 10% Tarif Tax Treaty		215.880.000
	Jumlah PPh yang harus dibayar BUT Kakikuda. Co. Ltd. Tahun 2014 adalah:		
	PPh Badan		719.600.000
	PPh Pasal 26 (4)		215.880.000
	Jumlah		935.480.000



b. Lihat peraturan Menteri Keuangan No.14/PMK.03/2011

Cara mengurangi PPh yang harus dibayar:

Dalam hal penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia, penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26 ayat 4).

Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan diberikan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk:

- Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
- Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
- Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; atau
- Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

c. Penghematan

Penghematan pajak yang dapat diperoleh adalah sebesar PPh Pasal 26 (4) yaitu sebesar Rp215.880.000



3. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di industri otomotif, khususnya pasar komponen otomotif. PT ABC dimiliki 100% oleh SYZ Co (perusahaan Singapura) dimana SYZ Co dimiliki 100% oleh JKL Co (perusahaan Jepang). Selain kepemilikan di SYZ Co, JKL Co juga memiliki kepemilikan 80% di TUV Co (perusahaan Thailand) dan kepemilikan 70% di MNO Co (perusahaan Malaysia).

Bisnis utama PT ABC di bidang pembuatan, perakitan dan pendistribusian AC mobil dan komponennya. Produk PT ABC diantaranya *compressor, evaporator, cooling unit, hose and pipe* dan *front housing*. Sedangkan bisnis PT ABC lainnya adalah distribusi produk otomotif dengan membeli barang jadi dari JKL Co, lalu menjual kembali produk otomotif tersebut tanpa menambahkan nilai yang signifikan (tanpa proses perubahan bentuk apapun) pada produk yang ada.

Berikut adalah tiga transaksi yang dilakukan PT ABC di tahun 2015:

- Transaksi penjualan barang jadi AC mobil kepada SYZ Co dengan margin 24%. Barang jadi yang dijual ke SYZ Co merupakan barang yang dirakit sendiri oleh PT ABC dengan bahan baku yang diperoleh dari industri lokal.
- Pembelian barang jadi dari JKL Co, PT ABC menetapkan margin penjualan atas produk ini ke pelanggan sebesar 26%.

Terkait dengan pembuatan *TP Doc* untuk ketiga transaksi di atas, dilakukan analisis kesebandingan dan diperoleh data-data dari perusahaan pembanding sebagai berikut:

- *Interquartile range margin* untuk transaksi penjualan produk jadi AC mobil adalah antara 10% hingga 27% dengan *median* 15%
- *Interquartile range margin* untuk perusahaan *reseller* produk otomotif berkisar antara 9% hingga 21% dengan *median* 13%.

Diminta

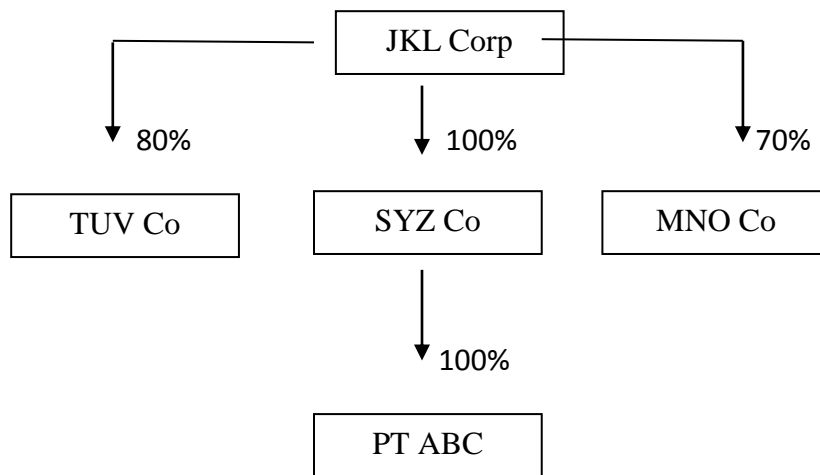
- a. Berikan penjelasan apakah PT ABC memiliki hubungan istimewa dengan JKL Co, SYZ Co, MNO Co, dan TUV Co dan gambarkan skema hubungan di antara kelima perusahaan tersebut.
- b. Dari informasi di atas, tentukan metode *transfer pricing* yang paling sesuai untuk kedua transaksi dan sertakan alasannya.
- c. Berikan pendapat anda terkait isu kewajaran harga atau margin PT ABC berdasarkan data di atas.

Jawaban dan Referensi:

Jawaban A

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UU PPh tahun 2008, disebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain; hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua WP atau lebih; atau hubungan di antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir;
- b. WP menguasai WP lainnya atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.



Jadi, berdasarkan peraturan di atas dan bagan yang dibuat, bisa disimpulkan bahwa PT ABC memiliki hubungan istimewa dengan JKL Corp., dan SYZ Co.

Sedangkan MNO Co., dan TUV Co. jika dilihat dari informasi yang ada tidak secara langsung memiliki hubungan istimewa dengan PT ABC. Kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan istimewa dalam bentuk *sister company* karena pemilik utama ketiga perusahaan adalah JKL Corp.



Jawaban B

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, disebutkan bahwa dalam **penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar** wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (*The Most Appropriate Method*).

Terdapat 5 metode untuk menentukan harga wajar yaitu:

- a. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/**CUP**);
- b. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/**RPM**);
- c. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method/**CPM**);
- d. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/ **PSM**); atau
- e. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/**TNMM**).

- **penjualan barang jadi kepada SYZ Co.**

Dengan mempertimbangkan bahwa barang jadi yang dijual ke SYZ Co. merupakan barang yang dirakit sendiri oleh PT ABC dengan bahan baku yang diperoleh dari industri lokal maka:

- ✓ jika PT ABC selain melakukan penjualan ke SYZ Co. juga melakukan penjualan ke perusahaan lain yang independen maka metode yang paling tepat untuk transaksi ini adalah **CUP dengan pembanding data internal**
- ✓ jika PT ABC tidak melakukan penjualan ke perusahaan selain ke SYZ Co. dan jenis produk yang dijual perusahaan tidak ada pasarnya maka dengan mempertimbangkan bahwa produk yang dijual perusahaan berupa barang jadi maka metode yang paling tepat untuk transaksi ini adalah **TNMM**

- **pembelian barang jadi dari JKL Corp.**

Dengan mempertimbangkan bahwa PT ABC melakukan distribusi produk otomotif dari barang JKL Corp. tanpa menambahkan nilai yang signifikan (tanpa proses perubahan bentuk apapun) pada produk yang ada maka disini PT ABC berperan sebagai *reseller* dari JKL Corp. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa sudah dilakukan analisis kesebandingan dan diperoleh data-data perusahaan sejenis maka metode yang paling tepat untuk transaksi ini adalah dengan menggunakan metode **RPM**.



Jawaban C

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, disebutkan bahwa Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (*single price*) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (*arm's length range/ALR*).

Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan
- b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan

Dengan asumsi persyaratan di atas terpenuhi maka untuk:

- **penjualan barang jadi kepada SYZ Co.**

karena *margin* PT ABC yaitu 24% masih berada dalam rentangan kuartil pertama dan ketiga yaitu antara 10% - 27% maka *margin* PT ABC tersebut masih wajar.

- **pembelian barang jadi dari JKL Corp.**

karena *margin* PT ABC yaitu 26% berada di luar rentangan kuartil pertama dan ketiga yaitu antara 9% - 21% maka *margin* PT ABC tersebut tidak wajar.

Namun, karena disini *margin reseller* PT ABC lebih besar daripada perusahaan sejenis maka untuk otoritas pajak Indonesia tidak terlalu dipermasalahkan. Yang menjadi masalah adalah jika dilihat dari sisi otoritas perpajakan Jepang sebagai Negara dari JKL Corp. Sehingga jika *TP Doc* ini diberikan kepada otoritas Jepang pasti akan timbul masalah.



4. PT SEPAKAT, suatu perusahaan manufaktur yang berdomisili di Karawang, meminta bantuan CIANG Co. Ltd., perusahaan yang berkedudukan di Cina, untuk memberikan jasa perbaikan beberapa mesin produksinya. Jangka waktu perjanjian ini adalah empat bulan. CIANG Co. Ltd. menugaskan JOHOR Sdn. Bhd., perusahaan yang berkedudukan di Malaysia, untuk melakukan pekerjaan ini di Karawang. JOHOR Sdn. Bhd. berhasil menyelesaikan penugasan ini selama tiga bulan setengah.

Pasal 5 ayat (3) huruf b) P3B Indonesia-Cina menyatakan bahwa,

Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:

- b) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui pegawai-pegawai atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan (untuk proyek yang sama atau yang berhubungan) untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari enam bulan dalam periode duabelas bulan;

Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia-Cina menyatakan bahwa,

Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3 ayat (2) huruf (i) P3B Indonesia-Malaysia menyatakan bahwa,

istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi :

- (i) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultan yang diberikan oleh suatu perusahaan melalui karyawan-karyawannya atau orang lainnya (daripada suatu agen yang berdiri sendiri sesuai yang dimaksud dalam ayat 6) dimana kegiatan berlangsung terus-menerus di satu Negara pihak pada Persetujuan untuk waktu lebih dari 3 bulan.



Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia-Malaysia menyatakan bahwa,

Laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila

perusahaan itu menjalankan usaha seperti tersebut di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya

tetapi hanya atas bagian laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap, atau atas penjualan barang atau barang dagangan

yang sejenis seperti yang dijual, atau transaksi usaha lainnya yang sejenis yang dilakukan, melalui bentuk usaha tetap.

Diminta:

- a. Untuk melakukan penghematan pajak, apa saran yang sebaiknya dilakukan?
- b. Jika saran tidak dilaksanakan, apa dampak perpajakannya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi di atas? Kaitkan pengaruh PPh, baik dengan mekanisme *self assessment* maupun *withholding tax*.

Jawab:

- a. CIANG, Co., Ltd. membuat Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai dengan Per-10/PJ/2017 dengan mengisi Form DGT1 dan/atau Form DGT2 untuk mendapatkan manfaat Tax Treaty. Dengan menyertakan SKD, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf b) P3B Indonesia-Cina, CIANG, Co., Ltd. tidak dianggap memiliki BUT di Indonesia karena aktivitas pemberian jasanya dilakukan tidak lebih dari enam bulan di Indonesia. Dengan demikian penghasilan CIANG, Co., Ltd. di Indonesia diperlakukan sebagai laba usaha. Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia-Cina menyatakan bahwa laba usaha hanya akan dikenakan pajak di Negara domisili. Penghasilan yang diterima CIANG, Co., Ltd. dari Indonesia akan diterima penuh karena Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas laba usaha sesuai dengan P3B Indonesia-Cina.
- b. Apabila CIANG, Co., Ltd. tidak melengkapi dokumen SKD, maka sesuai dengan Pasal 2 (5) UU PPh, CIANG, Co., Ltd. akan ditetapkan memiliki BUT di Indonesia karena pemberian jasanya dilakukan lebih dari 60 hari di Indonesia.

Jika CIANG, Co., Ltd. ditetapkan memiliki BUT di Indonesia, maka atas penghasilannya:

- dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% oleh pemakai jasa.

NASKAH UJIAN CHARTERED ACCOUNTANT (CA)

TAHUN 2016-2017

MANAJEMEN PERPAJAKAN



- CIANG, Co., Ltd. akan menghitung PPh terutang pada akhir tahun sebesar tarif PPh Badan (25%) dari penghasilan neto dan PPh Pasal 23 yang dipotong pemakai jasa dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.
- CIANG, Co., Ltd. juga akan dikenakan PPh Pasal 26 (4) – Branch Profit Tax sebesar 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi PPh Badan.



5. Suatu grup usaha terdiri dari entitas induk, PT ABC, dan beberapa entitas anak, PT AAA, PT BBB, PT CCC, dan PT DDD. Kelima entitas tersebut memperoleh penghasilan neto (rugi) fiskal dalam suatu tahun pajak masing-masing Rp100.000.000.000, Rp10.000.000.000, Rp5.000.000.000, (Rp8.000.000.000), dan Rp2.000.000.000. Setiap entitas dikenakan pajak dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, kecuali untuk PT CCC yang mengalami kerugian fiskal. PT CCC telah beberapa tahun mengalami kerugian fiskal.

Diminta:

- a. Jika saudara diminta memberikan pendapat untuk melakukan penghematan pajak grup usaha tersebut, apa saran yang mungkin diberikan?
- b. Berdasarkan saran yang saudara berikan, berapa penghematan pajak yang diperoleh grup usaha tersebut?

Jawab:

- a. Saran yang mungkin dapat diberikan:
 - Melakukan merger, di mana perusahaan yang terus-menerus mengalami kerugian fiskal ditutup dan digabungkan dengan perusahaan yang memperoleh laba fiskal sehingga dasar pengenaan pajaknya berkurang sebesar kerugian fiskal dari perusahaan yang merugi.
 - Melakukan transaksi afiliasi dengan maksud menggeser laba perusahaan yang laba ke perusahaan yang rugi. Misalnya penjualan yang biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan yang laba dilakukan melalui penjualan ke perusahaan yang rugi dan perusahaan yang rugi menjual ke pihak luar dengan harga yang sama jika dijual langsung oleh perusahaan yang laba. Perusahaan yang laba menjual ke perusahaan yang rugi dengan harga lebih rendah sehingga sebagian laba dipindahkan ke perusahaan yang rugi. Persyaratan yang wajib dipenuhi adalah melengkapi transaksi afiliasi dengan Dokumentasi Harga Transfer (Transfer Pricing Documentations – TP Docs) untuk membuat pembuktian harga transaksi afiliasi adalah wajar.
- b. Penghematan yang dapat dilakukan adalah maksimal sebesar tarif PPh Badan (25%) atas laba maksimal yang dapat digeser ke perusahaan yang rugi atau penurunan laba gabungan jika dilakukan merger, yaitu sebesar $25\% \times 8Rp.000.000.000$ atau Rp2.000.000.000.



6. PT GIAT meminta bantuan PT BANGUN (memiliki SIUJK dengan kualifikasi Bukan Kecil) untuk melakukan konstruksi bangunan barunya. PT BANGUN menggunakan jasa PT SEMANGAT (memiliki SIUJK dengan kualifikasi Bukan Kecil) untuk melakukan konstruksi beberapa bagian bangunan milik PT GIAT. Selain itu, untuk melakukan kegiatan pengawasan konstruksinya tersebut, PT BANGUN juga menggunakan jasa PT AWAS (memiliki SIUJK dengan kualifikasi Bukan Kecil). PT SEMANGAT dan PT AWAS memenuhi kualifikasi untuk melakukan kontrak konstruksi langsung dengan PT GIAT.

Diminta:

- a. Jika saudara diminta memberikan pendapat untuk melakukan penghematan pajak atas transaksi jasa konstruksi di atas, apa saran yang akan saudara berikan?
- b. Berdasarkan saran yang saudara berikan, berapa penghematan pajak yang dapat diperoleh jika nilai kontrak PT BANGUN dengan PT SEMANGAT dan PT AWAS masing-masing bernilai Rp10.000.000.000 dan Rp5.000.000.000?

Jawab:

- a. Pemberian jasa oleh PT SEMANGAT dan PT AWAS dapat dibuatkan kontrak pemberian jasa langsung dengan PT GIAT, tanpa melalui PT BANGUN.
- b. Kondisi yang ada:
 - PT GIAT memotong PT BANGUN PPh Pasal 4 (2) sebesar 3% dari nilai kontrak
 - PT BANGUN memotong PT SEMANGAT PPh Pasal 4 (2) sebesar 3% x Rp10.000.000.000 atau sebesar Rp300.000.000.
 - PT BANGUN memotong PT AWAS PPh Pasal 4 (2) sebesar 4% x Rp5.000.000.000 atau sebesar Rp200.000.000.

Jika dilakukan kontrak langsung

- PT GIAT memotong PT BANGUN PPh Pasal 4 (2) sebesar 3% dari nilai kontrak yang telah dikurangi nilai kontrak langsung kepada PT SEMANGAT dan PT AWAS.
- PT GIAT memotong PT SEMANGAT PPh Pasal 4 (2) sebesar 3% x Rp10.000.000.000 atau sebesar Rp300.000.000.
- PT GIAT memotong PT AWAS PPh Pasal 4 (2) sebesar 4% x Rp5.000.000.000 atau sebesar Rp200.000.000.



Dengan demikian pajak yang dapat dihemat adalah $3\% \times (\text{Rp}10.000.000.000 + \text{Rp}5.000.000.000)$ atau $\text{Rp}450.000.000$.

7. Sebuah perusahaan multinational yang berkantor pusat di Cina, yang mempunyai anak-anak perusahaan di beberapa negara, akan melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik. Saudara diundang untuk memberikan masukan dari segi perpajakan kepada direksi di kantor pusatnya.

Diminta:

Masukan apa saja yang akan saudara sampaikan kepada mereka yang mengandung unsur manajemen perpajakan yang sebaiknya dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut.

Jawaban:

PE Issue : Konsekuensi perpajakan yaitu: kewajiban NPWP, Fasilitas perpajakan

8. PT ABC baru saja menerima SKPKB PPh Badan tahun 2015 sebesar Rp5 miliar. Tidak ada bagian khusus yang menangani masalah perpajakan. Pihak manajemen perusahaan sedang bingung langkah apa yang seharusnya diambil.

Diminta:

Berikanlah analisis dan masukan Saudara, langkah apa yang seharusnya diambil oleh pihak manajemen?

Jawaban:

SKPKB: pertimbangkan apakah akan --- atau menolak SKPKB tersebut – kekutan – jika usaha dan ketentuan --- harus dipenuhi



9. Berikut ini adalah rekapitulasi omzet dari PT MANTAP (PKP), suatu perusahaan *event organizer*, selama tahun 2016.

Bulan	Omzet (Rp)
Januari	50.000.000
Februari	75.000.000
Maret	40.000.000
April	55.000.000
Mei	100.000.000
Juni	80.000.000
Juli	145.000.000
Agustus	125.000.000
September	100.000.000
Oktober	10 0.000.000
November	60.000.000
Desember	120.000.000
Total	1.050.000.000

Diminta:

Bagaimana perlakuan perpajakan PPh atas PT MANTAP (PKP)?

**NASKAH UJIAN CHARTERED ACCOUNTANT (CA)
TAHUN 2016-2017
MANAJEMEN PERPAJAKAN**



Jawaban:

Kewajiban Perpajakan PPh PT Mantap

Bulan	Omzet	Tarif	PPh 4(2)
Januari	50.000.000	1%	500.000
Februari	75.000.000	1%	750.000
Maret	40.000.000	1%	400.000
April	55.000.000	1%	550.000
Mei	100.000.000	1%	1.000.000
Juni	80.000.000	1%	800.000
Juli	145.000.000	1%	1.450.000
Agustus	125.000.000	1%	1.250.000
September	100.000.000	1%	1.000.000
Oktober	100.000.000	1%	1.000.000
November	60.000.000	1%	600.000
Desember	120.000.000	1%	1.200.000
Total	1.050.000.000		

Pada setiap masa pajak, EO Mantap harus membayarkan PPh terhutang paling lambat tanggal 15 masa pajak berikutnya dan dianggap melaporkan SPT Masa (PMK 107/2013 pasal 10).

Sumber: PP 46 Tahun 2013, UU KUP Pasal 3, PMK 107/PMK.011/2013



SOAL NO. 1

PT MAJU merupakan suatu perusahaan manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh PT MAJU, diketahui hal-hal berikut:

1. Liabilitas (dalam jutaan rupiah):

Liabilitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Utang dagang		
• Interest bearing	810.000	800.000
• Non-interest bearing	700.000	600.000
b. Pinjaman tanpa bunga dari PROGRESS Ltd. (pihak yang memiliki hubungan istimewa)	50.000	50.000
c. Utang jangka pendek		
• Utang kepada PT BERKEMBANG	725.000	800.000
d. Utang jangka panjang:		
• Utang kepada PT CERIA	660.000	900.000
• Utang kepada DEVELOP Co. Ltd.	1.970.000	2.500.000

2. Ekuitas (dalam jutaan rupiah):

Ekuitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Modal saham biasa	150.000	150.000
b. Tambahan modal disetor	110.000	110.000
c. Saldo laba	475.000	425.000



3. Penghasilan bruto tahun 2016 adalah Rp20.000.000.000.000, termasuk Rp5.000.000.000.000 yang berasal dari persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Final dan biaya pinjamannya merupakan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

4. Biaya pinjaman (bunga dan biaya terkait lainnya) tahun 2016 adalah Rp228.000.000.000 terdiri atas:
 - a. Biaya pinjaman kepada PT BERKEMBANG Rp96.000.000.000;
 - b. Biaya pinjaman kepada PT CERIA Rp20.660.000.000;
 - c. Biaya pinjaman kepada DEVELOP Co. Ltd Rp100.575.000.000; dan
 - d. Biaya pinjaman atas utang dagang (interest bearing) Rp10.765.000.000.

Diminta:

1. Berikan tanggapan atas posisi keuangan di atas, apakah perbandingan utang dan modal PT MAJU telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sertakan perhitungannya.
2. Jika perbandingan utang dan modal PT MAJU tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, apa saran yang saudara berikan agar perbandingan utang dan modal PT MAJU sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Jika saran yang saudara berikan tidak dilaksanakan, apa dampak perpajakannya bagi PT MAJU?

NASKAH UJIAN CHARTERED ACCOUNTANT (CA)

TAHUN 2016-2017

MANAJEMEN PERPAJAKAN



Jawab:

1. Saldo rata-rata utang

Rata-rata (Awal/Akhir)/2	Utang dagang (interest bearing)	PT Berkembang	PT Ceria	Develop, Co. Ltd	Jumlah
Rata-rata	805.000.000.000	762.500.000.000	780.000.000.000	2.235.000.000.000	4.582.500.000.000
Rata-rata pinjaman	4.582.500.000.000				

Saldo rata-rata modal

Rata-rata (Awal/Akhir)/2	Modal saham biasa	Tambahan Modal disetor	Saldo laba	Pinjaman kepada Progress, Ltd	Jumlah
Rata-rata	150.000.000.000	110.000.000.000	400.000.000.000	50.000.000.000	710.000.000.000
Rata-rata pinjaman	710.000.000.000				

Perbandingan utang dan modal (DER) = $4.582.500.000.000 : 710.000.000 = 6 : 1 \rightarrow$ tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maksimal DER menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 adalah 4:1

- Saran:** mengurangi pinjaman dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau mengubah menjadi modal saham
- Dampak perpajakan** \rightarrow perlu dilakukan koreksi fiskal atas biaya bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NASKAH UJIAN CHARTERED ACCOUNTANT (CA)**TAHUN 2016-2017****MANAJEMEN PERPAJAKAN**

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $\frac{4}{6}$ x biaya pinjaman dari masing-masing utang.

Jenis Utang	Rata-rata	Biaya Pinjaman	DE
PT Berkembang	762.500.000.000	96.000.000.000	64.000.000.000
PT Ceria	780.000.000.000	20.660.000.000	13.773.333.333
Develop Co., Ltd	2.235.000.000.000	100.575.000.000	67.050.000.000
Utang dagang	805.000.000.000	10.765.000.000	7.176.666.667
Jumlah	4.582.500.000.000		152.000.000.000

Total penghasilan bruto	20.000.000.000.000
Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan	5.000.000.000.000
Penghasilan yang dikenakan PPh tidak final	15.000.000.000.000
Biaya bunga yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan = $\frac{15}{20}$ x 152.000.000.000	114.000.000.000